



## Serahkan Hasil Pemeriksaan LPKD, BPK Ingatkan Efisiensi

NEGARA, NusaBali

Selama hampir sebulan belakangan ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Bali telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (LPKD) Jembrana tahun 2018. Setelah merampungkan tugas mereka di Jembrana, Kepala BPK RI Perwakilan Bali bersama anggota, menyerahkan hasil pemeriksaan kepada Bupati Jembrana I Putu Artha, di ruang VIP Bupati Jembrana, Jumat (26/4)

Kepala BPK Perwakilan Bali Sri Haryoso Suliyanto, mengatakan selain melakukan pemeriksaan, kehadiran BPK RI ke daerah-daerah juga selalu mengedepankan asas pembinaan. Dari hasil pemeriksaan sesuai fakta di lapangan, selain secara umum telah baik, ada beberapa hal yang perlu diatensi Pemkab Jembrana. "Dalam sebulan kami melakukan pemeriksaan



● NUSABALI/IB DIWANGKARA  
Bupati Artha ketika menerima hasil pemeriksaan LPKD Jembrana tahun 2018 dari BPK Perwakilan Bali, di ruang VIP Bupati Jembrana, Jumat (26/4).

tentu ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian. Terhadap beberapa kekurangan yang menjadi catatan, tentunya kami minta agar Pemkab Jembrana melakukan langkah-langkah kongkret sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," ujarnya.

Dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran, Sri Haryoso Suliyanto juga mengingatkan Pemkab Jembrana, agar tetap mengacu pola

efisiensi dan membuat pertanggungjawaban tepat waktu. Melalui pola tersebut, tentunya pembangunan daerah akan cepat maju, dan kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat. "Tentu Pemerintah dituntut dalam pengelolaan anggaran, dikelola dengan penuh efisiensi. Sementara setiap anggaran yang dikeluarkan agar disertai dengan pertanggungjawaban sesuai aturan yang ada. ode

Edisi : Sabtu, 27 April 2019

Hal : 7



## *Bedah Rumah Bantuan Badung Ditargetkan Dimulai Awal Mei*

### **Tabanan (Bali Post) -**

Program bedah rumah untuk Kabupaten Tabanan yang anggarannya bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kabupaten Badung terus berproses. Ditargetkan awal Mei ini pengerjaan fisik bisa dimulai. Sejauh ini, dari 300 unit penerima bantuan, baru 250 penerima yang telah menyetorkan proposal ke Dinas Sosial (Disos). Terkait hal ini, Kadisos Tabanan I Nyoman Gde Gunawan pun berharap aparat desa senantiasa membantu penerima bantuan dalam hal penyiapan proposal agar bisa segera direalisasikan.

"Sejauh ini masih tahap verifikasi proposal, itupun belum semua penerima bantuan menyetorkan proposal mereka. Minimal awal Mei sudah bisa terealisasi," ucapnya, Senin (29/4) kemarin.

Selain memverifikasi proposal, untuk program bedah rumah bantuan BKK Badung ini juga tengah proses

pembuatan buku tabungan bagi penerima lantaran realisasi bantuan akan langsung ditransfer ke rekening penerima. Terkait 50 orang penerima yang sampai saat ini belum menyetorkan proposal, Gunawan juga telah mengumpulkan Perbekel. "Mereka penerima dalam membuat proposal dibantu desa, karena tidak mungkin penerima yang *notabene* sudah uzur membuat proposal," ucapnya.

Selama proses verifikasi, kata Gunawan, tidak banyak ditemukan kesalahan fatal. Hanya ada kekeliruan kecil, seperti data antara nama dengan di KTP, namun hal tersebut sudah bisa diatasi.

Untuk proses selanjutnya, masih menunggu perampungan penerima bantuan untuk setor proposal. Karena ketika sudah selesai verifikasi, proposal disetorkan ke Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) untuk proses pencairan dana. "Sistem pencairan itu Bakeu-

da yang punya, apakah bertahap atau sekalian. Hanya saja proses pencarian bantuan diprediksi mulai awal Mei," tegas Gunawan.

Untuk diketahui, Kabupaten Tabanan mendapat bantuan bedah rumah khusus keluarga tidak mampu sebanyak 300 unit. Mereka nantinya akan mendapat Rp 50 juta untuk bisa mendapatkan rumah yang layak, dan bantuan tersebut disalurkan sementara hanya untuk lima kecamatan di Tabanan.

Rinciannya, untuk Kecamatan Pupuan sebanyak 146 unit dengan total bantuan sebesar Rp 7.300.000.000, Kecamatan Selemadeg 69 unit senilai Rp 3.450.000.000, Kecamatan Selemadeg Timur 38 unit senilai Rp 1.900.000.000, Kecamatan Marga 34 unit dengan nilai Rp 1.700.000.000 dan Kecamatan Selemadeg Barat 13 unit dengan nilai Rp 650.000.000. Dengan begitu, total nilai bedah rumah Rp 15.000.000.000. (kmb28)

Edisi : Selasa, 30 April 2019

Hal : 7



## PEMBANGUNAN ✓

### Dermaga Cruise Tanah Ampo Dilanjutkan

**AMLAPURA**-Pembangunan dermaga cruise Tanah Ampo, Manggis segera dilanjutkan bupati Karangasem IGA Mas Sumatri. Pemkab Karangasem mengusulkan tambahan anggaran untuk kelanjutan proyek pelabuhan berlabuhnya cruise atau kapal pesiar tersebut.

Kepala Badan Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bapelitbanda) I Made Sujana Erawan membenarkan hal itu. Pihaknya mengaku telah mengusulkan kelanjutan pembangunan dermaga cruise. Bahkan, anggarannya sebesar Rp 200 miliar telah diusulkan ke pusat. Sujana sendiri berharap usulan ini bisa disetujui kementrina PUPR.

Sementara itu, bupati Karangasem IGA mas Sumatri mengatakan akan melanjutkan pembangunan dermaga cruise tersebut sampai kelar. Bahkan saat bertemu presiden Joko Widodo dirinya mengaku sudah mengusulkan terkait kelanjutan dermaga Tanah Ampo tersebut kepada presiden.

Pembangunan dermaga diperpanjang 145 meter juga diperlebar 24 meter. Ini dilakukan agar dermaga tersebut layak disinggahi kapal pesiar berukuran besar. Dengan perpanjangan dermaga nantinya kapal cruise internasional bisa singgah di pelabuhan tersebut.

Pemkab Karangasem juga mengusulkan tambahan bantuan kapal penumpang yang akan menyerang dari Padang Bai ke Lombok sebanyak satu unit. Nilai kapal tersebut sebesar Rp 7 miliar.

Selain itu, Karangasem juga akan membangun dermaga satu lagi di Amed, Abang. "Kita juga sudah usulkan untuk pembangunan pelabuhan di Amed, Abang, Karangasem dengan nilai Rp 200 miliar," tukasnya.(tra/dot)

Edisi : Selasa, 30 April 2019

Hal : 9



## Radar Bali

# Jembatan Penyaringan Dirancang Elastis dan Tahan Banjir

**NEGARA** - Jembatan penghubung Banjar Penyaringan dengan Banjar Anyar Tengah, Desa Penyaringan, yang putus total akibat banjir bandang Tukad Biluk Poh, akhir bulan Desember lalu. Akhirnya masuk dalam rencana umum pengadaan (RUP) anggaran induk 2019. Jembatan baru nanti, sesuai dengan Detail Engineering Design (DED) akan dibuat elastis dan tahan banjir.

Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Jembrana I Wayan Darwin, saat ini progres rencana pembuatan jembatan dalam proses persiapan RUP. Proses lelang jembatan, akan dimulai pada pertengahan bulan Mei mendatang. "Mudah-mudahan minggu kedua bulan Mei masuk

ULP (unit layanan pengadaan)," jelasnya, Senin (29/4).

Dijelaskan, pembuatan jembatan baru sebagai pengganti jembatan yang ambruk, akan dibuat lebih baik dengan sebelumnya. Jembatan akan dibuat dengan sistem pratekan. Sistem pratekan yang bisa menjadikan beton sebagai bahan elastis yang bisa menahan tegangan tarik akibat dari beban luar. Jadi, dibuat dengan beton jadi seperti pembuatan *shortcut*.

Jembatan baru nanti kekuatan penahan dengan kabel. Sistem pratekan ini selain untuk meninggikan jembatan, juga agar tidak ambruk ketika terjadi banjir besar karena berada di daerah aliran sungai cukup deras. Apabila jembatan dibuat seperti sebelumnya, dimana ada pilar di tengah

jembatan khawatirnya ketika ada jembatan ambruk lagi. "DAS Sungai Biluk Poh cukup deras dalam periode tertentu

khawatirnya ambruk," terangnya. Darwin menambahkan, jembatan baru nanti akan dibuat sepanjang 44 meter

dan lebar 4,5 meter. Anggaran untuk pembuatan jembatan sebesar Rp 4 miliar dari APBD Jembrana. **(bas/gup)**

Edisi : Selasa, 30. April, 2019

Hal : 5



# Jangan Tunggu Kejadian Baru Berbenah

## ● Waspada Dua Lubang di Trotoar Balai Desa Tusan

**SEMARAPURA, TRIBUN BALI** - Sejumlah trotoar di Klungkung masih mengalami kerusakan. Seperti yang tampak di ruas jalan raya Desa Tusan, Banjarangkan. Trotoar di depan Balai Desa Tusan, tampak berlobang.

Terdapat dua titik trotoar jebol. Tidak ada tanda peringatan yang dipasang sehingga sangat berbahaya bagi pejalan kaki. Terlebih ruas jalan tersebut kerap dilalui warga karena merupakan jalur menuju pasar Desa Tusan.

"Sudah lama ini berlobangnya, sudah lebih dari 2 Minggu. Tapi belum ada penanganan," ujar Ketut Diarsa, warga setempat, Senin (29/4).

"Sebelumnya di lokasi lubang itu juga ada tanda peringatan yang dibuat oleh warga namun telah hilang. Diarsa tidak memungkiri kondisi itu sangat membahayakan bagi pejalan kaki terutama saat malam hari.

Ia berharap pemerintah terkait bisa segera melakukan pemeliharaan dua lubang di trotoar tersebut.

Sementara di dalam lubang tampak tumpukan sampah menjejali sehingga hal ini rawan menyebabkan banjir saat musim hujan. "Jangan tunggu sampai ada orang kecelakaan dulu, baru kemudian dibehani. Ini harus segera," sarannya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Klungkung, I Nyoman Susanta menjelaskan, trotoar di depan Balai Desa Tusan tersebut merupakan kewenangan kabupaten. "Itu manhole rusak, segera akan kami tangani. SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) untuk pemeliharaan rutinnya sudah keluar," ujar Susanta.

Sementara, Dinas PU saat menganggarkan Rp 200 juta untuk perawatan rutin infrastruktur yang menjadi kewenangan Kabupaten. "Masih ada beberapa trotoar kewenangan kabupaten. Tapi kami sudah siapkan dana pemeliharanya dalam tahun berjalan melalui dana pemeliharaan rutin," ungkapnya. (mit)



TRIBUN BALI/EKA MITA SUPUTRA

**BERBAHAYA** - Kondisi trotoar jebol di depan Balai Desa Tusan, Jumat (12/4)



# Serapan APBD Belum Maksimal

Tabanan (Bali Post) -

Hingga triwulan I 2019, serapan APBD Kabupaten Tabanan belum maksimal. Berdasarkan data Bapelitbang Tabanan, realisasi belanja daerah baru mencapai Rp 315.312.347.892,74 atau 14,19 persen dari total senilai Rp 2.222.413.783.733,14. Sementara pendapatan daerah yang di APBD 2019 dipasang Rp 1.949.387.421.120, hingga triwulan I terealisasi sebesar Rp 481.382.905.062 atau 24,69 persen.

Kepala Bapelitbang Tabanan Ida Bagus Wiratmaja menjelaskan, belum adanya pekerjaan fisik yang dilakukan dalam tiga bulan pertama menjadi salah satu penyebab serapan anggaran masih minim. Pencairan anggaran sejauh ini hanya sebatas kegiatan yang sifatnya rutin seperti pengadaan jasa atau gaji pegawai.

Pada triwulan I, lanjut Wiratmaja, pekerjaan pembangunan baru sebatas perencanaan dan melengkapi

administrasi. "Jadi masih kegiatan yang bersifat rutin saja dan untuk kegiatan fisik baru sebatas administrasinya saja," terangnya, Minggu (28/4) kemarin.

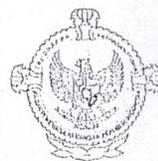
Menurutnya, untuk kegiatan fisik kebanyakan baru berjalan pada triwulan berikutnya. "Kegiatan fisik seperti pembangunan jalan, irigasi, kantor, bale banjar, pura dan lainnya, sebagian besar baru mulai berjalan triwulan II," terangnya.

Terkait pembangunan atau

peningkatan jalan tahun ini, Wiratmaja menyatakan direncanakan dilaksanakan di 58 lokasi. Pekerjaan meliputi program peningkatan jalan kabupaten sebanyak 40 lokasi dan program rehabilitasi atau pemeliharaan jalan dan jembatan. Total anggaran mencapai Rp 154 miliar, dengan sumber anggaran dari DAK, DAU, BKK Provinsi Bali dan BKK Kabupaten Badung. Wiratmaja mengaku optimis anggaran dapat terserap dengan baik. (kmb28)

Edisi : Senin, 29 April 2019

Hal : 7



## Anggaran Terbatas, Pembangunan Depo Arsip Ditunda

Tabanan (Bali Post) -

Perda Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan belum bisa dilaksanakan maksimal. Salah satunya terkait depo arsip. Pembangunan depo arsip belum mampu diwujudkan lantaran keterbatasan keuangan daerah.

"DED depo arsip kami sudah punya sejak tahun 2017. Bahkan sudah terbentuk PPTK di mana saat itu dianggarkan untuk pembangunan depo arsip sebesar Rp 3 miliar. Namun karena kondisi keuangan daerah dengan skala prioritas lainnya, terpaksa ditunda," ucap Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tabanan I Wayan Kotio, Jumat (26/4) kemarin.

Keberadaan depo arsip, kata Kotio diatur dalam salah satu pasal di Perda No. 13/2018 yang pada intinya menyatakan, lembaga kearsipan daerah harus memiliki depo arsip. Selain juga diatur tentang semua OPD atau pencipta arsip wajib mengelola arsipnya.

"Depo arsip ini sebenarnya berfungsi menyimpan arsip yang bersifat statis maupun vital milik daerah seperti BPKB, sertifikat tanah aset daerah, serta dokumen penting lainnya. Seandainya diperlukan atau muncul permasalahan kasus hukum yang harus didukung dengan bukti arsip, tentu akan lebih gampang," terangnya.

Akibat belum memiliki depo arsip, saat ini untuk arsip-arsip baik itu yang bersifat dinamis maupun statis masih dibawa oleh perangkat daerah atau pembuat arsip. "Sekarang kami belum mau menyimpan arsip yang sifatnya strategis karena belum ada tempatnya. Jika nanti sudah ada depo arsip barulah bisa melakukan akuisisi. Begitupun petugas yang berjaga di sana harus benar-benar bisa dipercaya karena itu arsip yang memang bersifat vital bagi daerah," ucapnya.

Awalnya depo arsip direncanakan dibangun di bekas RPH di Jalan Pulau Nias, Tabanan. Pada 2017 Dinas PU sudah merampungkan DED-nya. Sayangnya karena anggaran terbatas, bahkan sempat terjadi defisit, depo arsip belum bisa didirikan.

"Jika depo ini terealisasi, kita punya impian membuat aplikasi untuk memudahkan dalam proses *input* arsip dan tahu jadwal kapan arsip itu harus keluar dan dimusnahkan, karena untuk penyusutan arsip harus ada mekanismenya. Ini yang belum jalan," jelasnya. (kmb28)

Edisi : Sabtu, 27 April 2019

Hal : 7



## Bedah Rumah BKK Badung Belum Cair Dinsos Proses Verifikasi Proposal ✓

TABANAN, NusaBali

Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Tabanan tengah memverifikasi proposal bantuan sosial (Bansos) penerima bedah rumah bantuan BKK (Bantuan Keuangan Khusus) Kabupaten Badung. Dari 300 calon penerima bantuan, baru 250 penerima setorkan proposal ke Dinas Sosial Tabanan. Diperkirakan bantuan akan terealisasi awal Mei 2019.

Kepala Dinsos Tabanan I Nyoman Gede Gunawan menjelaskan saat ini pihaknya tengah memverifikasi proposal penerima bantuan bedah rumah. Termasuk juga tengah proses pembuatan buku tabungan karena ketika terealisasi bantuan tersebut langsung di-transfer ke penerima. "Kami masih

tahap verifikasi proposal mereka," ungkapnya, Jumat (26/4).

Dikatakan, dari 300 penerima bantuan bedah rumah BKK Badung, baru 250 penerima yang setorkan proposal. Sisanya, 50 penerima masih tengah proses. "Mereka penerima dalam membuat proposal dibantu desa, karena tidak mungkin penerima yang notabane sudah usur membuat proposal. Kami sudah sempat kumpulkan perbekel untuk membantu," tegasnya.

Diakui, Gunawan selama proses verifikasi tidak banyak ditemukan kesalahan fatal. Hanya terjadi keliru data antara nama dengan di KTP. Namun hal tersebut sudah bisa diatasi. "Kesalahan hanya nama yang ditulis

tidak cocok di KTP namun kami sudah bisa atasi," imbuhnya.

Untuk proses selanjutnya, ditambahkan Gunawan, masih menunggu perampungan penerima bantuan untuk setor proposal. Karena ketika sudah selesai verifikasi proposal di-setorkan ke Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) untuk proses pencairan. "Sistem pencairan itu Bakeuda yang punya apakah bertahap atau sekalian. Hanya saja proses pencarian bantuan diprediksi mulai awal Mei," tegas Gunawan.

Kabupaten Tabanan mendapat bantuan bedah rumah khusus keluarga tidak mampu sebanyak 300 unit. Total nilai bedah rumah ke Tabanan Rp 15 miliar. **des**

Edisi : Sabtu, 27 April 2019

Hal : 7